

## Kerjasama Jepang dan Indonesia

Seniwati  
Munif Arif Ranti  
Oktaviano Nandito Guntur  
Ibnu Aly Badiu

*Department of International Relations, Hasanuddin University  
Makassar, Indonesia*

### **ABSTRAK**

*This article focuses on the cooperation between Japan and Indonesia. At the beginning of the article, we discussed the development of the Japanese economy after World War II. The Japanese economy collapsed after World War II. However, in the 1960s and 1980s, Japan had become the highest-paid economy. Japan develops technology and builds human resources by focusing on their social infrastructure and social traditions. Japan does not take funds from abroad to support its economic and technological development. Japan prefers to cooperate with local industry and social infrastructure development. Japan continues to build its education system and develop the business culture that has become their tradition. Indonesia and Japan have long established cooperation. The two countries cooperate in almost all sectors such as economic, cultural, social, and security. One form of bilateral cooperation that has been implemented is the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Indonesia is Japan's biggest development partner. Japan's overseas development assistance (ODA) has supported Indonesia's infrastructure, agriculture, industry, education, health and social development as well as institutional and capacity building.*

**Keywords:** *cooperation, ODA, IJEPA, social infrastructure, social tradition*

### **ABSTRAK**

Artikel ini berfokus pada kerjasama Jepang dan Indonesia. Pada awal artikel, kami membahas perkembangan ekonomi Jepang setelah Perang Dunia II. Perekonomian Jepang hancur setelah terjadinya Perang Dunia II. Meskipun demikian, pada era tahun 1960an hingga 1980an, Jepang telah menjadi ekonomi dengan berupah tertinggi. Jepang mengembangkan teknologi dan membangun sumber daya manusia dengan berfokus pada infrastruktur sosial dan tradisi sosial mereka. Jepang tidak mengambil dana dari luar negeri untuk mendukung pembangunan ekonomi dan teknologinya. Jepang lebih memilih untuk menjalin kerja sama dengan industri lokal dan pembangunan infrastruktur sosial. Jepang terus membangun sistem pendidikannya dan mengembangkan kultur bisnis yang telah menjadi tradisi mereka. Indonesia dan Jepang sudah lama menjalin kerja sama. Kedua negara menjalin kerjasama hampir disemua sektor seperti ekonomi, kebudayaan, sosial, dan keamanan. Salah satu bentuk kerja sama bilateral yang telah terlaksana seperti Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Indonesia merupakan mitra pembangunan terbesar bagi Jepang. Bantuan pembangunan luar negeri Jepang (ODA) telah mendukung pembangunan infrastruktur, pertanian, industri, pendidikan, kesehatan dan sosial Indonesia serta pembangunan kelembagaan dan kapasitas.

**Kata Kunci:** *kerjasama, ODA, IJEPA, infrastruktur sosial, tradisi sosial*

## **1. PENDAHULUAN**

Jepang pada masa kini merupakan negara dengan ekonomi yang sangat pesat walaupun memiliki sejarah yang tragis. Jepang pernah hancur dikarenakan kekalahannya di akhir Perang Dunia (PD) II dan menyerah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada bagian ini kami mencoba untuk menjelaskan peran Perdana Menteri Saionji Kinmochi dan Perdana Menteri Wakatsuki Reijiro pada eranya beserta kontribusinya pada masa perang yang di mana hal tersebut menuntun Jepang kepada kekalahannya. Kemudian kami akan

mencoba untuk memberikan gambaran mengapa Jepang dapat berdiri kembali setelah kehancurannya yang merupakan sebab dari pertumbuhan ekonomi yang pesat hingga masa kini.

Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia (PD) II oleh pasukan sekutu, Jepang kemudian menarik seluruh pasukannya dari semua wilayah yang mereka kuasai dan kembali ke Jepang. Hal ini juga termasuk Indonesia yang dalam sejarah sendiri tertulis bahwa setelah Perang Dunia II, Indonesia telah memanfaatkan situasi ini dan menyusun kemerdekaan pada tahun 1945. Jepang menyatakan kealahannya setelah Amerika Serikat menjatuhkan dua bom atom pada kota Hiroshima dan Nagasaki. Amerika meluncurkan aksi tersebut untuk membalas tindakan Jepang atas penyergapan dan penyerangan pada Pearl Harbour. Dengan demikian, Jepang kehilangan seluruh wilayah kekuasaannya yang telah mereka perjuangkan sejak tahun 1894. Sisa-sisa dari mesin-mesin perang Jepang dimusnahkan, dan para kriminal perang ditahan. Kekalahan Jepang sendiri tidak dapat diterima oleh perwira perang, sehingga 500 dari mereka melakukan bunuh diri dan banyak di antara mereka di eksekusi (Oikonomos, 2016).

Penulis akan menjelaskan kontribusi Perdana Menteri Saionji Kinmochi terhadap ekonomi Jepang. Semenjak Saionji Kinmochi menjabat sebagai perdana menteri untuk langkah pertama ia ingin mengubah perspektif dari masyarakatnya untuk menghadapi era baru di dunia yaitu globalisasi. Dengan berbekal pengalaman edukasi yang telah dia dapatkan setelah menuntut ilmu di Eropa. Saionji menyalurkan dana negara beserta kekayaannya untuk mengembangkan aspek militer pada negara Jepang yang tentu saja hal ini dimanfaatkan pada saat Perang Dunia terjadi. Kondisi ini memberi gambaran bahwa Saionji berkontribusi terhadap Perang Dunia. Selanjutnya dalam tulisan ini kami lanjutkan kepada Perdana Menteri Wakatsuki Reijiro. Pada saat ia menjabat, Wakatsuki Reijiro berkontribusi dengan memperluas wilayah kekuasaan Jepang di Asia dan dilanjutkan oleh Perdana Menteri Jepang selanjutnya selama Era Perang Dunia ke Dua.

Ekonomi Jepang tentu saja hancur setelah Perang Dunia II. Namun dari tahun 1960an hingga 1980an terjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat dan menyeluruh diberbagai wilayah di Jepang. Jepang telah menjadi ekonomi dengan berupah tertinggi di akhir periode tersebut. Namun di periode selanjutnya, di akhir 1990an terjadi timbal balik terhadap periode sebelumnya, di periode ini pertumbuhan ekonomi Jepang mulai melambat, periode ini sendiri dikenal dengan 'Lost Decade' atau dekade hilang yang disebabkan dari runtuhnya harga aset Jepang.

Walaupun demikian Jepang sendiri memiliki sumber daya manusia dengan kemampuan tinggi yang merupakan buah hasil yang mereka dapatkan dari pengembangan teknologi militer yang mereka lakukan di Era Perang Dunia II sebelumnya. Dengan dasar tersebut Jepang mengimplementasi hal tersebut pada strategi pembangunan ekonomi Jepang. Dengan memanfaatkan evolusi dari perubahan-perubahan ekonomi yang telah mereka rasakan, perekonomian Jepang sendiri tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan kebudayaannya. Dengan demikian Jepang memfokuskan perkembangannya terhadap infrastruktur sosial dan menggabungkannya dengan tradisi sosial mereka.

Untuk mendukung pembangunannya, Jepang membutuhkan dana yang tidak sedikit, walaupun demikian Jepang tidak memanfaatkan dana dari negara lain secara berlebihan dengan demikian Jepang tidak memiliki ketergantungan terhadap luar negeri, berbeda dengan negara-negara Eropa. Jepang memiliki alasan tersendiri mengapa tidak mengambil dana dari luar negeri seperti negara-negara lainnya hal tersebut tidak lain dikarenakan Jepang merupakan negara yang tidak kaya akan sumber daya alam yang tentu saja dikarenakan wilayah negara Jepang sendiri lebih kecil dari negara-negara Eropa, oleh

karena itu negara lain tidak ingin memasukkan cabangnya di Jepang dalam bentuk Foreign Direct Investment.

Pemerintah Jepang tidak ingin melakukan kesalahan yang sama dari negara-negara Eropa, khususnya dalam hutang negeri yang di mana hal ini dapat berimbas kembali terhadap negara. Intinya Jepang sendiri mengambil dasar dari kesalahan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Jepang sendiri memiliki pengalaman pribadi terhadap hutang, yang di mana hutang tersebut tidak dapat dipenuhi dari proyek yang dihasilkan dengan pemanfaatan hutang tersebut. Jepang sendiri lebih memilih untuk menjalin kerja sama dengan industri lokal untuk menyukseskan program pembangunan untuk mendorong perekonomian nasional. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat khususnya mereka yang menjadi pengusaha-pengusaha yang baru.

Pemerintah Jepang lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur sosial. Sebab, dampak dari perang dunia kedua sendiri terhadap Jepang telah memberikan destruksi besar terhadap Jepang, secara spesifik menghancurkan infrastruktur sosial dan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran yang tidak dapat dihindari. Walaupun demikian Jepang pasca Perang Dunia II memfokuskan sistem pendidikan yang telah diterapkan pada masa Tokugawa dan mendorong masyarakatnya untuk terus melanjutkan edukasinya, khususnya dalam konteks membaca serta menulis, di samping itu Jepang terus membangun sistem pendidikannya dan mengembangkan kultur bisnis yang telah menjadi tradisi mereka. Dua hal tersebut merupakan hal yang penting untuk mengembangkan sumber daya manusia di Jepang dan menjadi donasi yang kuat untuk menghadapi pertumbuhan ekonomi modern Jepang dalam relatif singkat. Hal yang telah kami singgung sebelumnya mencerminkan bahwa sumber daya manusia merupakan aspek yang tidak kalah pentingnya dari bagian infrastruktur sosial khususnya dalam proses pembangunan.

Jepang sendiri memiliki karakteristik yang tidak mudah menyerah dan diakui oleh dunia internasional. Tidak hanya sumber daya manusia mereka yang dikenal hebat, masyarakat Jepang juga dikenal dengan pribadi yang disiplin dan tidak mudah menyerah. Contohnya dalam konteks budaya, mereka mengimplementasikan sistem kerja kolektif dan tidak senang dalam menyalin karya lain. Masyarakat Jepang juga berusaha dan belajar dari kesalahan yang diperbuat oleh negara lain dan menganalisis kemajuannya sebagai hasilnya. Jepang yang merupakan negara yang telah menjadi korban dari Perang Dunia II yang hancur dapat berdiri kokoh di zaman sekarang. Dari sekian negara-negara yang berada di Asia, Jepang merupakan negara dengan perkembangan cepat dalam menggapai negara modern. Pertumbuhan ekonomi Jepang sendiri pada saat ini dapat menyaingi Tiongkok dan Amerika Serikat yang di mana kedua negara tersebut merupakan negara yang di konsiderasi sebagai negara superpower pada masa ini walaupun telah menjadi negara yang hancur dikarenakan oleh kekalahannya pada masa Perang Dunia II.

## **2. KERANGKA KONSEP**

Untuk mengatasi masalah global, para pemimpin dunia harus bekerja sama karena banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi. Sangat tidak mungkin suatu negara dapat bertahan hidup tanpa bekerja sama dengan negara lain. Menurut perspektif liberal, kerja sama internasional dimungkinkan untuk menangani masalah-masalah dalam hubungan internasional. Teori liberalisme meyakini bahwa hakikat sistem internasional berkembang dari waktu ke waktu dan terus menjadi lebih damai seiring berjalannya waktu. Liberalis berpendapat bahwa perdamaian dan kerja sama dimungkinkan untuk mencapai dunia yang lebih baik daripada tentang konflik dan perang. Burchill berpendapat bahwa liberalisme modern mendukung aktor negara dan non-negara untuk berkoordinasi dalam mempromosikan perdamaian global serta untuk meningkatkan pembangunan politik, ekonomi dan sosial di seluruh dunia (Kasih, 2018:10).

Konsep teori liberalisme digunakan untuk menjelaskan hubungan kerjasama Indonesia - Jepang melalui penerapan ODA sebagai kebijakan ekonomi luar negeri. Kontribusi ODA Jepang bagi pembangunan Indonesia sebenarnya didasarkan pada saling ketergantungan antara kedua negara ini dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Selain itu, kebijakan ODA tidak hanya untuk mengamankan kepentingan nasional Jepang, tetapi juga berupaya untuk mendorong tujuan pembangunan global. Dengan demikian konsep liberalisme dapat menjelaskan kerjasama antara Jepang dan Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan global melalui perdagangan dan investasi (Kasih, 2018:10).

### **3. METODE PENELITIAN**

Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis kerjasama antara Jepang dan Indonesia pasca Perang Dunia II. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah salah satu bentuk cara mengumpulkan data sekunder. Data sekunder dapat berupa review dari laporan pemerintah atau organisasi non pemerintah yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Metode ini dapat menghemat waktu dan tenaga peneliti karena tidak perlu turun ke lapangan untuk mengambil data (Direktorat Of Distance Education, 2015). Metode ini dilakukan karena saat ini tengah terjadi masa pandemi COVID-19 sehingga sangat sulit bagi peneliti untuk turun ke lapangan mengambil data.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Hubungan kerjasama Indonesia dan Jepang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hubungan baik dengan Jepang. Hubungan keduanya pun sudah berjalan selama 60 tahun lamanya, hal itu dapat kita lihat ketika Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono dalam The 6th Strategic Dialogue Indonesia-Jepang yang bertepatan juga dengan 60 tahun hubungan diplomatik antara dua negara tersebut. Pertemuan tersebut bertempat di Ibu Kota Republik Indonesia yaitu Jakarta pada 25 Juni 2018. Pertemuan tersebut merupakan pengalaman pertama menteri luar negeri Jepang berkunjung ke Indonesia. Dalam pertemuan tersebut selain melibatkan kementerian luar negeri, hadir pula wakil kementerian koordinator bidang perekonomian, kementerian koordinator bidang maritim serta kementerian kelautan dan perikanan (NusaKini, 2018).

Indonesia dan Jepang sudah lama menjalin kerja sama, hubungan diplomatik yang dimulai pada bulan Januari 1958, dengan penandatanganan perjanjian damai antara Indonesia dan Jepang di Jakarta yang dianggap bisa memberikan manfaat kedua negara tersebut dimasa depan (Safitri, 2018:1). Kedua negara menjalin kerjasama hampir disemua sektor seperti ekonomi, kebudayaan, sosial, dan keamanan. Pertemuan tersebut menjadi kerjasama strategis yang melibatkan *governemmnt to government*. Kerjasama bilateral antara kedua negara terus berlanjut. Kerja sama bilateral yang merupakan perjanjian kemitraan ekonomi antara kedua negara yang telah terlaksana seperti Indonesia-Jepang atau yang akrab kita sebut dengan IJEPA. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) merupakan salah satu bentuk kesepakatan bilateral kedua negara ini dalam hal perekonomian, dan kerja sama keduanya adalah perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang merupakan kerja sama yang pertama kali dilakukan Indonesia dengan negara lain. Dalam perjanjian tersebut merupakan perwujudan kerja sama bilateral yang dilakukan Jepang dalam realisasi Kemitraan Ekonomi Kompherensif Perjanjian atau CEPA dengan negara-negara yang menjadi anggota Asosiasi Bangsa Asia Tenggara yaitu ASEAN (Safitri, 2018:1).

Kerjasama IJEPA memberikan pengaruh positif bagi kedua negara sehingga berdampak pada peningkatan hubungan ke arah yang lebih baik dan pencapaian kepentingan nasional masing-masing negara. Kedua negara dapat mengambil keuntungan dari kerjasama yang telah terjalin tersebut. Dimasa seperti sekarang ini yaitu Pandemi Covid-19 mengakibatkan

kemerosotan perekonomian negara bahkan dunia, dengan adanya kerjasama yang ditingkatkan oleh negara bisa membantu mengatasi adanya kemerosotan perekonomian tersebut. Terjadinya PHK (Pemutusan Hak Kerja) oleh perusahaan-perusahaan mengakibatkan angka pengangguran yang semakin meningkat sehingga peran pemerintah dalam mengatasi hal tersebut sangat diperlukan. Melalui pertemuan guna untuk meningkatkan hubungan kerja sama Indonesia dan Jepang dalam hal ekonomi khususnya peningkatan pada bagian industri manufaktur. Jepang dan Indonesia sepakat untuk menjalin kerja sama dalam sektor tersebut dan dengan ini Jepang memberikan bantuan kepada Indonesia untuk meningkatkan perindustrian di Indonesia.

Berbagai produk buatan Jepang di pasarkan di Indonesia mulai dari pakaian, makanan, mobil sampai elektronik (laptop, handphone dan lain-lain). Bisa kita ambil contoh dari bidang farmasi, ada istilah yang kita kenal dengan GMP (*Good Manufacturing Practice*) yang dalam prakteknya memberikan kontribusi pada kinerja produsen dibidang makanan dan minuman (Dwi Suseno, 2019:132). Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara sehingga peluang untuk memasarkan produk lebih besar dibandingkan negara-negara lainnya. Jepang juga merupakan negara dengan perekonomian yang sangat maju sehingga peluang kerja sama kedua negara ini memiliki keuntungan masing-masing. Indonesia yang merupakan negara berkembang tentunya tidak sepadan dengan Jepang yang merupakan negara maju dengan begitu pastinya Indonesia mengalami kendala untuk memasarkan produknya di Jepang. Meskipun begitu Jepang merupakan investor terbesar di Indonesia dengan demikian bisa membantu Indonesia dalam pengembangan ekonomi di berbagai sektor salah satunya di industri manufaktur. Produk Jepang yang banyak dipasarkan di Indonesia merupakan produk yang memiliki kualitas tinggi dan banyak diminati oleh masyarakat Indonesia.

## **2. Strategi Shigeru Yoshida Pasca Perang Dunia terhadap Indonesia**

Setelah Perang Dunia 2 usai, Jepang dihadapkan dengan beberapa masalah baik secara internal maupun secara eksternal. Salah satu masalah yang harus diselesaikan setelah masa pertempuran berlangsung adalah penegakan perdamaian di antara Jepang sebagai negara penjajah dan negara-negara yang dijajah. Dengan usainya peperangan di seluruh belahan dunia, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat saat itu melakukan negosiasi terhadap Jepang sebagai salah satu negara yang banyak melakukan tindak kolonialisme. Sebagai langkah pertama dalam menetralsir keadaan pasca PD 2, misi perdamaian diawali dengan mengadopsi kebijakan terkait pembahasan perjanjian dengan negara-negara di seluruh dunia (Shigeru, 1961).

*Treaty of San Fransisco* diratifikasi oleh 48 negara yang merupakan negara sekutu atau negara bekas jajahan Jepang di masa Perang Dunia II pada tahun 1951. Salah satu isi dari *Treaty of San Fransisco* menyebutkan tentang Jepang yang dilarang untuk menggunakan kekuatan militernya baik itu di darat, laut, maupun udara dan juga potensi lainnya yang dianggap dapat menimbulkan perang kembali tidak diperbolehkan untuk digunakan. Bahkan untuk hak berperang-pun, Jepang tidak memilikinya karena ditakutkan akan menimbulkan keberlanjutan dari perang yang sebelumnya telah berakhir (ShingetsuNews, 2018).

Maka dari itu akibat dari kekalahan Jepang serta dibuatnya *Treaty of San Fransisco* membuat arah kebijakan Yoshida lebih memfokuskan kepada pertumbuhan serta pembangunan ekonomi industri serta infrastruktur yang pada mulanya mengalami kehancuran parah akibat pengeboman yang terjadi oleh Amerika Serikat. Untuk keamanan militernya sendiri, Shigeru Yoshida menyerahkan kepada pihak sekutu dalam hal ini Amerika Serikat dalam sebuah aliansi Amerika-Jepang untuk memegang kendali keamanan militernya dengan membangun pangkalan militer Amerika di Jepang. Dengan memberikan kendali militernya kepada Amerika, Yoshida dapat dengan fokus untuk membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi negaranya. Pihak Amerika pun memanfaatkan kerjasama

bilateral ini dalam sistem bipolar yang pada saat itu terjadi dengan pihak Uni Soviet pada era perang dingin di masa itu. Ini merupakan sebuah strategi yang dibuat oleh Yoshida dalam merekonstruksi kembali pemerintahan pasca Perang Dunia II (Koga, 2019).

Alasan lainnya mengapa Yoshida sangat bersikukuh untuk membangun kembali perekonomiannya terlebih dahulu dibandingkan yang lain dikarenakan isi dari *Treaty of San Fransisco* yang mengharuskan Jepang untuk memberikan uang kompensasi kepada negara yang pernah dijajah dan ia hancurkan sebagai biaya ganti rugi dan pertanggungjawabannya sebagai pihak yang kalah dalam perang. Tentunya disini jumlah yang harus dibayarkan bukanlah dalam jumlah yang terbilang sedikit. Salah satunya seperti Indonesia yang merupakan salah satu negara yang tidak meratifikasi *Treaty of San Fransisco* meskipun perwakilan Indonesia telah berada di San Fransisco pada saat itu. Indonesia malah justru menandatangani perjanjian reparasi bilateral dan perjanjian perdamaian (Audiopedia, 2015).

Dari sinilah awal mula dari hubungan kerjasama Jepang dengan negara-negara di Asia Tenggara yang beberapa diantaranya merupakan bekas jajahannya. Indonesia pun menjadi salah satu negara yang terlibat dalam hal ini. Pada saat meratifikasi *Treaty of San Fransisco*, pihak Indonesia terpecah belah menjadi dua kubu dimana kubu pertama dalam kabinet Sukiman dan Suwirjo yang menganggap bahwa perjanjian ini tidak akan memberikan manfaat apapun bagi Indonesia. Namun bagi pihak Sasyumi, menganggap bahwa justru sebaliknya bahwa perjanjian ini dapat menjadi jembatan penghubung untuk membentuk kerjasama baru antara Indonesia dengan Jepang. Akibat hal inilah yang membuat Indonesia terlambat dalam pengambilan keputusan untuk meratifikasi *Treaty of San Fransisco* pada tahun 1951 (Isnaeni, 2010).

Masalah reparasi kolonial pada dasarnya belum terselesaikan hingga adanya upaya diplomasi ekonomi yang dicanangkan oleh Jepang. Pada masa pasca Perang Dunia II, Jepang dihadapkan dengan kondisi perekonomian yang hancur dan kekalahan yang diterima Jepang akibat ledakan bom yang dilakukan oleh musuh. Hal ini tentunya menjadi suatu tantangan dalam masa pemerintahan Shigeru Yoshida sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebagai upaya pemenuhan kewajiban reparasi kolonial dan penanganan masalah internal dan eksternal Jepang khususnya menyangkut aspek ekonomi, akhirnya beberapa kebijakan dibentuk oleh Yoshida sebagai strategi pemulihan ekonomi Jepang saat itu (PacificCentury, 2016).

Pergerakan ekonomi Jepang saat itu ditandai dengan kepentingan nasional yang mengarah pada ekonomi terpusat dan kerjasama antara pemerintahan dengan bank serta perusahaan-perusahaan besar. Dalam perkembangannya, kepentingan nasional Jepang beranjak pada kebijakan luar negeri yang menysasar pada negara-negara aliansi seperti Amerika Serikat dan negara bekas jajahannya. Akhirnya, Jepang mengupayakan diplomasi ekonomi yang ditetapkan oleh Yoshida sebagai strategi dalam menanggulangi masalah ekonomi Jepang pasca Perang Dunia II usai. Kesadaran Jepang akan adanya hubungan saling bergantung antar negara yang menyentuh aspek politik dan ekonomi negara mengharuskan Jepang menerapkan diplomasi dalam penegakan hubungan luar negerinya.

Namun strategi diplomasi ekonomi tersebut pada akhirnya tidak mendapatkan manfaat seperti yang diperkirakan dan berdampak terhadap hubungan multilateral Jepang dengan negara-negara di Asia Tenggara. Hal ini terjadi akibat ketidakstabilan ekonomi dan politik masing-masing pihak, sehingga hubungan luar negeri juga tidak berlangsung dengan baik. Kecurigaan negara-negara bekas jajahan dan kurangnya modal Jepang dalam merealisasikan diplomasi ekonominya juga menjadi faktor penghambat keberhasilan strategi Yoshida terhadap Asia Tenggara. Bahkan di tahun 1951 hingga 1954, skema pembangunan luar negeri yang telah dirancang untuk pengembangan ekonomi luar negeri bersama yang

melibatkan beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia yang kaya akan sumber daya alam akhirnya tidak berjalan dengan semestinya (J.W.Dower, 1979).

Dalam prosesnya, strategi ini pada dasarnya diramu dalam Doktrin Yoshida yang berlandaskan pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Walaupun kegagalan dalam proses pengembangan ekonomi secara bilateral dan multilateral terhadap beberapa negara khususnya Asia mengalami kegagalan, doktrin tersebut pada akhirnya menjadikan Jepang sebagai salah satu negara pembangkit ekonomi terbesar di dunia dan memudahkan reintegrasi Jepang ke dalam sistem yang berlaku secara internasional. Walaupun pada masa pemerintahan Yoshida tidak berhasil membangun ekonomi luar negerinya dengan negara-negara di Asia Tenggara, di masa pemerintahan setelahnya yang dipimpin oleh Koizumi akhirnya berhasil membentuk hubungan multilateral dan bilateral terhadap negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia (Siew Man, 2007).

### **3. Kerjasama Indonesia-Jepang Melalui Official Development Assistance (ODA)**

Selama 60 tahun terakhir, Jepang telah menjadi sumber pembangunan eksternal terpenting bagi Indonesia. Pada saat yang sama, Indonesia merupakan mitra pembangunan terbesar bagi Jepang. Bantuan pembangunan luar negeri Jepang (ODA) telah mendukung pembangunan infrastruktur, pertanian, industri, pendidikan, kesehatan dan sosial Indonesia serta pembangunan kelembagaan dan kapasitas. Bantuan pembangunan luar negeri Jepang (FDA) telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kebangkitan ekonomi dan industrialisasi Indonesia. Selama ini hubungan ini tumbuh dalam lingkungan geopolitik yang kondusif, di mana ekonomi pasar dan demokrasi menjadi institusi dasarnya. Dalam kerangka kelembagaan tersebut, sektor publik dan swasta Jepang telah berkontribusi pada munculnya Indonesia dari negara miskin dan penuh dengan konflik di kawasan Asia Tenggara menjadi negara berpenghasilan menengah yang stabil, modern, dengan pasar yang berkembang. Di sisi lain, Indonesia pernah menjadi pilar Jepang di Asia Tenggara. Indonesia mengikuti jejak Jepang untuk membebaskan diri dari jebakan pendapatan menengah dan berusaha untuk menjadi negara maju dalam dua dekade mendatang. Alih-alih bantuan, penekanan kerja sama ekonomi di masa depan harus lebih banyak pada investasi dan perdagangan (Kartasasmita, 2020).

*Official Development Assistance (ODA)* sebagai Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Jepang Saat ini para aktor negara dan non-negara dalam hubungan internasional berupaya untuk mendorong kerjasama pembangunan yang bertujuan untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di negara berkembang. ODA merupakan salah satu kerjasama ekonomi yang terdiri dari bantuan keuangan dan teknis. Setelah bergabung dengan Colombo Plan, Jepang memulai ODA dengan kerjasama teknis sebagai upaya untuk berkontribusi dalam pembangunan bersama reparasi pascaperang. Jepang terus meningkatkan jumlah ODA sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jepang. Pada tahun 1989, ia berhasil mengambil posisi Amerika Serikat sebagai penyedia ODA nomor satu di dunia. Pedoman dan alasan utama komitmen Jepang dalam program bantuan didasarkan pada Piagam ODA yang diadopsi pada tahun 1992. Piagam tersebut menyatakan bahwa Jepang memberikan bantuan karena kepedulian kemanusiaannya kepada orang miskin, untuk memperkuat saling ketergantungan internasional, dan untuk melindungi lingkungan. Kementerian Luar Negeri Jepang membagi ODA menjadi empat tahap. Tahap pertama (1954 hingga 1976) disebut sebagai pengembangan sistem ketika bantuan internasional sebagai reparasi Perang Dunia II. Tahap kedua (1977 hingga 1991) lebih cenderung sebagai perluasan sistemik. Selama tahap ini, Jepang berkontribusi pada kebutuhan masyarakat ODA dari 1992 hingga 2002 yang mengacu pada tahap ketiga. Pada tahap ini, pembuat kebijakan menyadari pentingnya memberikan ODA yang berkualitas daripada kuantitas. Hal ini diharapkan dapat membantu pembangunan di negara penerima, khususnya kawasan Asia sebagai penerima prioritas Jepang (Kasih, 2018:33).

Bagi Indonesia, Jepang merupakan pemberi bantuan terbesar, sejak tahun 1960 Jepang telah memberikan kontribusi sebesar 45% dari nilai kumulatif bantuan pembangunan pemerintah (ODA) kepada Indonesia. Di sisi lain, selama ini Jepang telah memberikan bantuan kepada 190 negara dan wilayah melalui bantuan pembangunan resmi. Di antara negara-negara tersebut, Indonesia adalah negara yang paling terbantu, terhitung 11,3%. Ini menunjukkan kuatnya hubungan kedua negara. Bantuan dana pinjaman difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur utama, seperti pembangkit listrik, irigasi, pengendalian banjir, reklamasi lahan, kereta api, jalan, dan lain-lain. Infrastruktur ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar kawasan di negara-negara besar. Selain kerjasama finansial, kerjasama teknik sangat efektif dalam mengembangkan sumber daya manusia dan memperkenalkan sistem dan teknologi baru. Dapat dikatakan kerja sama ini telah memberikan kontribusi bagi pengembangan hubungan bilateral yang berbasis hubungan kemanusiaan (JICA, 2018:8).

Jepang dan Indonesia mulai membangun hubungan diplomatiknya pada tahun 1958 dengan penandatanganan *Treaty of Peace*. Indonesia merupakan mitra strategis bagi Jepang, karena berbagi nilai-nilai dasar demokrasi, HAM, dan ekonomi pasar serta telah lama menjalin hubungan baik dengan Jepang di tingkat internasional. Mereka telah membangun hubungan bilateral yang kuat karena memiliki mitra yang saling membutuhkan untuk kepentingan nasionalnya. Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengatakan bahwa saat ini terdapat sekitar 1500 perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia selama 15 tahun terakhir. Mereka mempekerjakan sekitar 4,7 juta tenaga kerja dan 93,3% adalah pekerja lokal (Kasih, 2018:23).

Salah satu aspek yang merupakan elemen penting untuk mendukung kestabilan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sarana transportasi. Dalam pembangunan sarana ini di daerah, ditekankan pada pemerataan hasil pembangunan dengan menghubungkan sumber daya yang tersebar di seluruh penjuru di Indonesia. Sedangkan untuk di daerah perkotaan seperti Jakarta, Jepang memberikan bantuan sesuai dengan kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia pada saat itu, dengan menitikberatkan pada pelaksanaan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan yang dipimpin oleh sektor swasta dan menghilangkan kesenjangan antara permintaan dengan penyediaan infrastruktur lalu-lintas yang meningkat akibat kenaikan jumlah penduduk dan motorisasi (JICA, 2018:9).

Kerjasama berikut dibidang pelestarian lingkungan. Fokus utama pendampingan di sektor Iklim adalah pada pelestarian lingkungan pada tahun-tahun awal periode evaluasi, kemudian dialihkan ke penanganan perubahan iklim. Salah satu bantuan Jepang terhadap Indonesia yaitu bantuan berupa Pinjaman Program Perubahan Iklim melalui pinjaman yen Jepang yang dilaksanakan di Indonesia berhasil mencapai tujuannya. Program pinjaman yen dianggap sebagai salah satu kontributor utama untuk membantu Indonesia mengatasi dampak perubahan iklim. Banyak kemajuan yang telah diamati di bidang perencanaan, perundang-undangan, pendataan, dan pengembangan sistem pembiayaan, antara lain, telah menghasilkan pengarusutamaan perubahan iklim dalam konteks pembangunan Indonesia. Beberapa proyek yang dibantu oleh Jepang setelah pinjaman program, seperti Proyek Indonesia - Jepang untuk pengembangan mekanisme pelaksanaan reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD), program Pengembangan masyarakat pengendalian kebakaran di kawasan lahan gambut dan kebakaran liar dan pengelolaan karbon di hutan gambut di Indonesia telah dilaksanakan dan serangkaian bantuan ini diyakini akan secara efektif mempengaruhi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia (Kokusai, 2019:12).



Selain beberapa sektor yang telah disebutkan di atas, Indonesia dan Jepang juga saling bekerjasama dalam menangani bencana yang terjadi. Kedua negara ini memang memiliki persamaan karakteristik bencana, karena sama-sama terletak di *Ring of Fire Pasific*, dengan curah hujan yang juga tinggi. Sejak tahun 1970-an hingga sekarang, Jepang terus melanjutkan kerjasama dengan Indonesia yang terkait dengan bencana gunung berapi. Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi kerusakan akibat bencana vulkanik di Indonesia, mencakup bidang yang luas mulai dari pembinaan sumber daya manusia hingga pembangunan fasilitas. Selain itu Indonesia juga membantu Jepang saat terjadi Tsunami dengan mengirimkan bantuan berupa Tim SAR dan juga bantuan medis dan obat-obatan (JICA, 2018:19).

## 5. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa diplomasi ekonomi yang merupakan salah satu strategi Yoshida yang direalisasikan dalam Doktrin Yoshida akhirnya membuka gerbang perdagangan antara Jepang dengan negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tentu aktivitas perdagangan ini mengubah arah hubungan luar negeri antara Jepang dengan Indonesia yang sebelumnya dihadapkan pada hubungan antara negara penjajah dan negara jajahan. Reparasi kolonial yang dicanangkan oleh Jepang juga turut membangun hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia hingga saat ini, dimana hal ini membuktikan bahwa Shigeru Yoshida dalam perannya sebagai Perdana Menteri Jepang yang menjabat selama dua periode telah mengupayakan terciptanya perdamaian antar negara bekas jajahannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Audiopedia. (2015). *Treaty of San Francisco*. Japan: Audiopedia. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=mHlfh3UzUJY&t=860s>
- Dwi Suseno, B. (2019). The Strength of Justified Knowledge Sharing on Good Manufacturing Practices: Empirical Evidence on Food Beverage Joint Venture Company of Japan - Indonesia. *Food Safety Management*, 20(170), 130-135. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/331428833\\_The\\_Strength\\_of\\_Justified\\_Knowledge\\_Sharing\\_on\\_Good\\_Manufacturing\\_Practices\\_Empirical\\_Evidence\\_on\\_Food\\_Beverage\\_Joint\\_Venture\\_Company\\_of\\_Japan\\_-\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/331428833_The_Strength_of_Justified_Knowledge_Sharing_on_Good_Manufacturing_Practices_Empirical_Evidence_on_Food_Beverage_Joint_Venture_Company_of_Japan_-_Indonesia)
- Isnaeni, H. F. (2010). Colonial Reparations. Retrieved 1 April 2021, from <https://historibersama.com/colonial-reparations/>
- J.W.Dower. (1979). *Empire and Aftermath: Yoshida Shigeru and the Japanese Experience, 1878-1954* (1st ed.). United States of America: Harvard University Asia Center. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1tg5gs2>
- JICA. (2018). *Indonesia 's Development and Japan 's Cooperation: Building the Future Based on Trust*. Jakarta, Indonesia. Retrieved from [https://www.jica.go.jp/publication/pamph/region/ku57pq00002izqzn-att/indonesia\\_development\\_en.pdf](https://www.jica.go.jp/publication/pamph/region/ku57pq00002izqzn-att/indonesia_development_en.pdf)
- Kartasasmita, G. (2020). Japan-Indonesia relations: Past, present and future. Retrieved 1 April 2021, from <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/10/16/japan-indonesia-relations-past-present-and-future.html>
- Kasih, D. N. (2018). *Japan Foreign Economic Assistance: The Implementation Of Official Development Assistance (Oda) Under Shinzo Abe Administration For Indonesia Infrastructure Development (2014-2016)*. President University. Retrieved from <http://repository.president.ac.id/handle/123456789/87?show=full>
- Koga, K. (2019). Japan's Diplomatic Strategy toward East Asia: Creation and Evolution of 'Dual-Track Diplomacy' in the Post-Cold War Era. *Baltic Journal of European Studies*, 9(2), 40-60. <https://doi.org/10.1515/bjes-2019-0013>
- Kokusai, K. (2019). *Evaluation of Japan's ODA to the Republic of Indonesia*. Japan.

- Retrieved from <https://www.mofa.go.jp/policy/oda/evaluation/FY2018/pdfs/indonesia.pdf>
- NusaKini. (2018). Indonesia-Jepang Langsungkan The 6th Strategic Dialogue di Jakarta. Retrieved 1 April 2021, from <https://nusakini.com/news/indonesia-jepang-langsungkan-the-6th-strategic-dialogue-di-jakarta>
- Oikonomos. (2016). *History of Postwar Japan Economy*. Japan: QueuePolitely channel. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=UjJWUc1nLVg>
- PacificCentury. (2016). *Reinventing Japan (entire)*. Japan: Pacific Century. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=LK738CDh21g>
- Safitri, R. M. (2018). *Indonesia-Japan bilateral relations: the implementation of Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement on the deployment and acceptance of Indonesian migrant workers (nurses) To Japan in 2008-2015*. President University. Retrieved from <http://repository.president.ac.id/bitstream/handle/123456789/463/016201400135.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Shigeru, Y. (1961). *The Yoshida memoirs: The story of Japan in crisis Hardcover - 1 Jan. 1961* (1st ed.). New Hampshire, united States: William Heinemann Ltd.
- ShingetsuNews. (2018). Japan Facts: Peace Constitution. Retrieved 1 April 2021, from <https://www.youtube.com/watch?v=yiYmvzGB3dl&t=66s>
- Siew Man, T. (2007). Japan's Grand Strategic Shift from Yoshida to Koizumi: Reflections on Japan's Strategic Focus in the 21st Century. *Akademika*, 70(1), 117-136. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/11493236.pdf>